

SIKLUS PENYELENGGARAAN SPIP

**Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya
2014**

PP 60, pasal 2 ayat 3

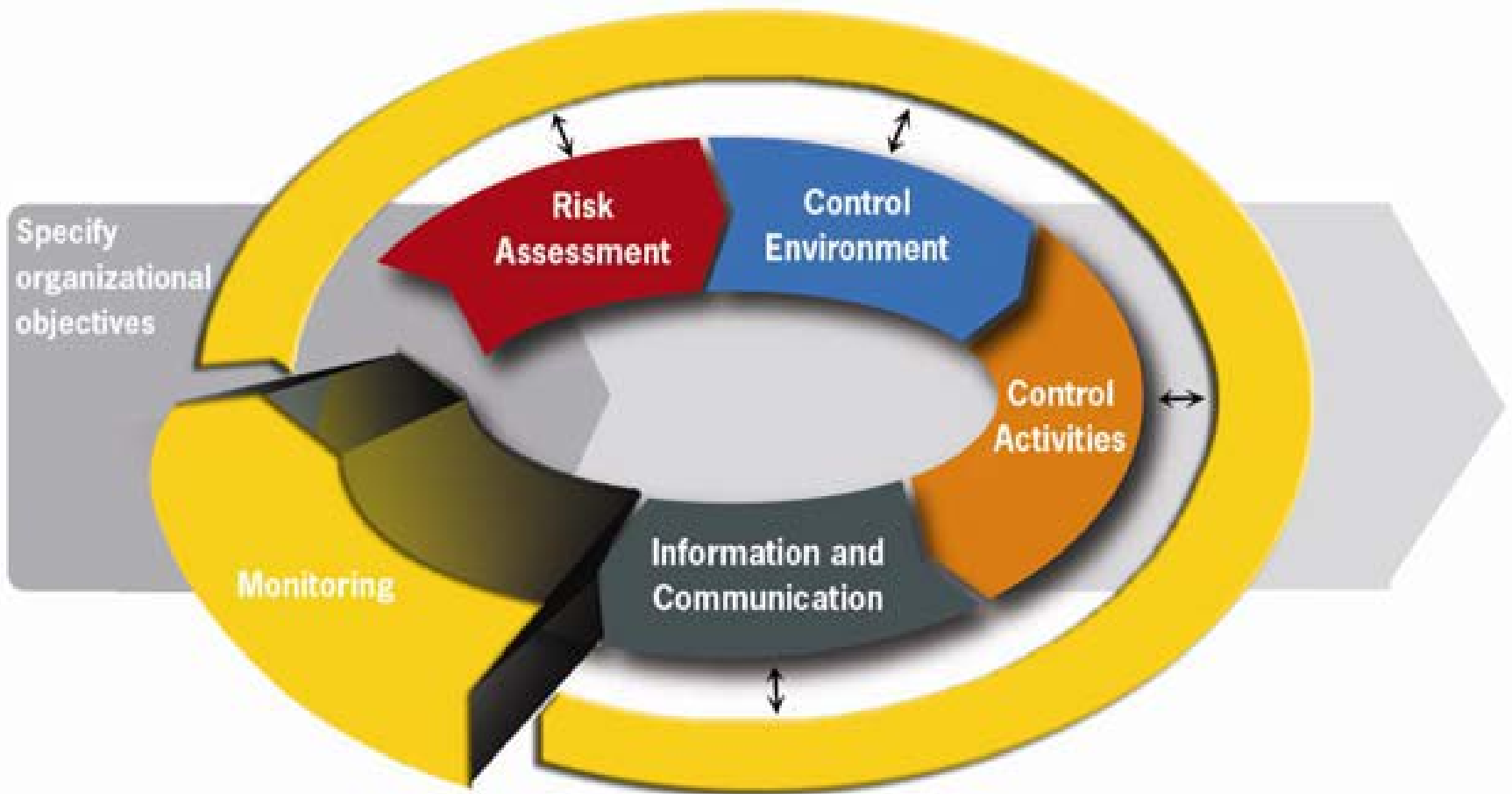
TUJUAN SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

PP 60/ 2008 - SPIP



Internal Control - COSO



Corruption Perception Index 2011

pada 32 Negara

1	New Zealand	9.5
2	Denmark	9.4
2	Finland	9.4
4	Sweden	9.3
5	Singapore	9.2
6	Norway	9.0
7	Netherlands	8.9
8	Australia	8.8
8	Switzerland	8.8
10	Canada	8.7
11	Luxembourg	8.5
12	Hong Kong	8.4
13	Iceland	8.3
14	Germany	8.0
14	Japan	8.0
16	Austria	7.8

16	Barbados	7.8
16	United Kingdom	7.8
19	Belgium	7.5
19	Ireland	7.5
21	Bahamas	7.3
22	Chile	7.2
22	Qatar	7.2
24	United States	7.1
25	France	7.0
25	Saint Lucia	7.0
25	Uruguay	7.0
	United Arab	
28	Emirates	6.8
29	Estonia	6.4
30	Cyprus	6.3
31	Spain	6.2
32	Botswana	6.1
32	Portugal	6.1
32	Taiwan	6.1

Mengapa 32 Negara Tersebut Dapat Bersih/Rendah Korupsi? Apa yang Dilakukan?

- ❑ Menerapkan SPIP
- ❑ Pengawasan Intern yang Efektif
- ❑ Pengawasan PBJ Sejak Perencanaan sampai dengan Pemanfaatan
- ❑ Mendirikan KPK

CARA MENGATASI KORUPSI di AMERIKA:

Perbaiki SPIP

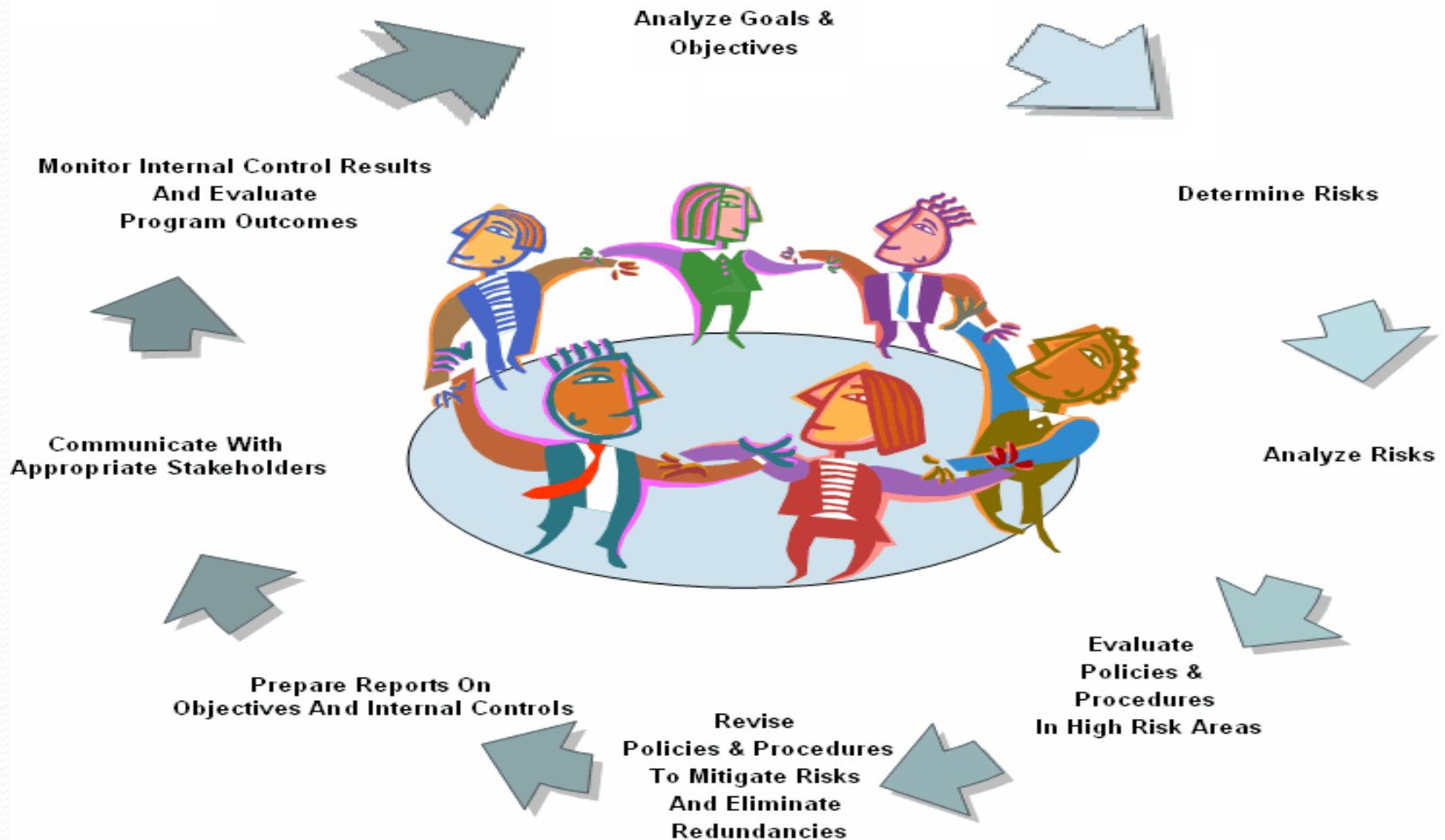
- **Good Corporate Government (GCG)**
- **Internal Control - COSO**
- **Enterprise Risk Management (ERM)**
- **Malcolm Baldrick's Act**

Posisi Indonesia didasarkan pada *Corruption Perception Index* 2011

69	Italy	3.9
69	FYR Macedonia	3.9
69	Samoa	3.9
73	Brazil	3.8
73	Tunisia	3.8
75	China	3.6
75	Romania	3.6
77	Gambia	3.5
77	Lesotho	3.5
77	Vanuatu	3.5
80	Colombia	3.4
80	El Salvador	3.4
80	Greece	3.4
80	Morocco	3.4
80	Peru	3.4
80	Thailand	3.4
86	Bulgaria	3.3

95	Tonga	3.1
100	Argentina	3.0
100	Benin	3.0
100	Burkina Faso	3.0
100	Djibouti	3.0
100	Gabon	3.0
100	Indonesia	3.0
100	Madagascar	3.0
112	Egypt	2.9
120	Iran	2.7
129	Syria	2.6
143	Russia	2.4
175	Iraq	1.8
177	Sudan	1.6
182	Korea (North)	1.0
182	Somalia	1.0

PROSES PENYUSUNAN SPIP di USA



PENERAPAN SPIP DI INDONESIA

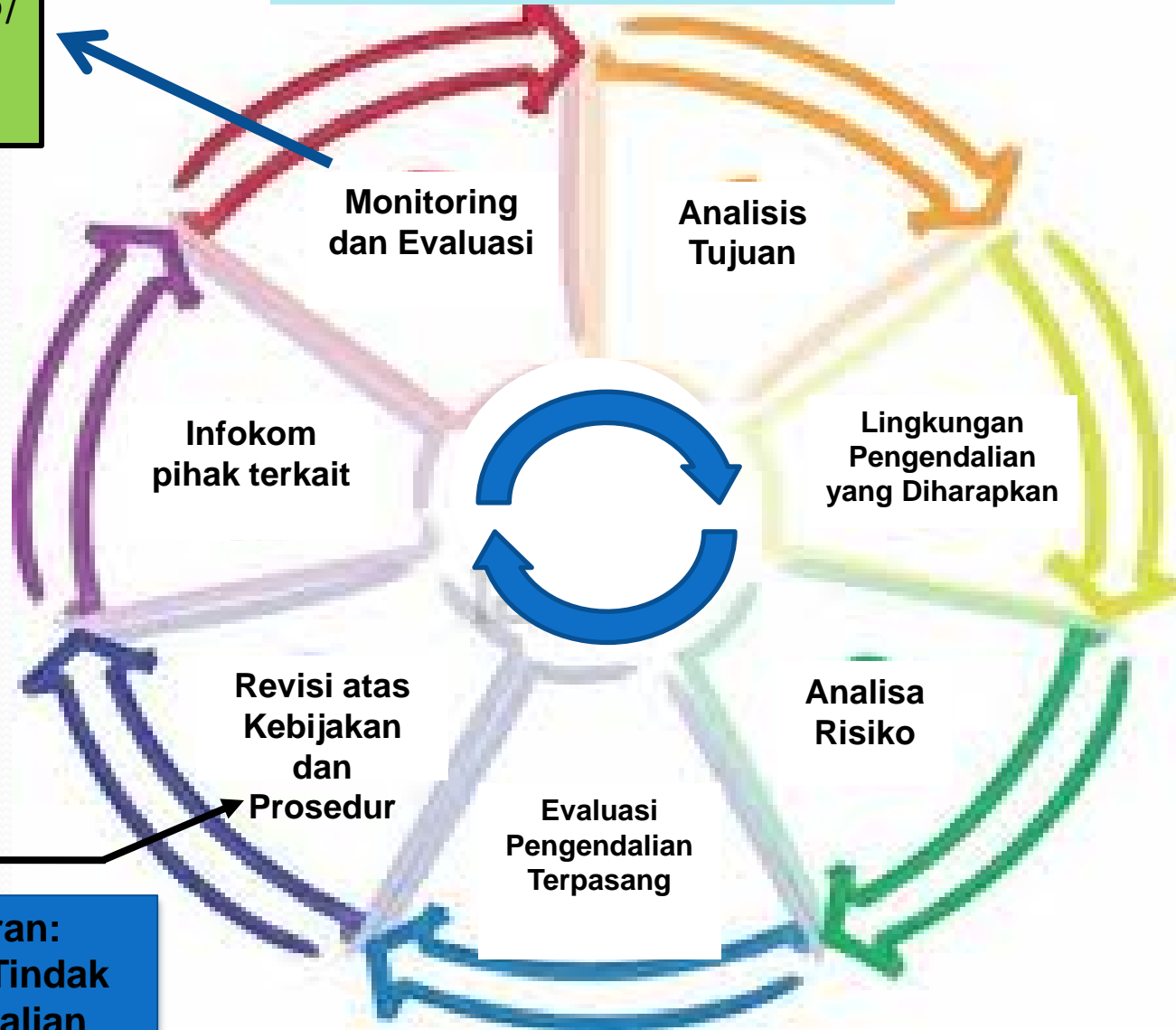
SPIP di INDONESIA



Perka: 10 Tahun 2013

SIKLUS SPIP

SOR
Men/Gub/Bup/
Wako/Kuk
PP 8/2006



**Pelaporan:
Rencana Tindak
Pengendalian
Intern**

NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB VII
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

- (1) Laporan Keuangan tahunan Kementerian Negara/ Lembaga/ pemerintah daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota/ kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PP No. 8 Tahun 2006
Tentang
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 26

- (1) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat pernyataan bahwa **pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP.**
- (2) Bentuk dan isi dari pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VI

LAMPIRAN VI-A
PP NOMOR 8 TAHUN 2006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Tahun Anggaran ... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

.....,

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati Walikota/Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah

(.....)

- UU 15/2004:

➔ Tiap tahun BPKRI
*memberikan Opini atas
Sistem Pengendalian Intern
Kementerian/Lembaga/
Pemda.*

Inpres 4 Tahun 2011

- Mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya pelaksanaan IP yg efisien & efektif, pelaporan keu yg dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yg tertib & akuntabel, serta ketaatan thd peraturan perundangan-undangan.
- Mengintensifkan peran APIP di lingkungan masing2 dlm memberikan keyakinan yg memadai atas terselenggaranya SPIP, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP.

STRATEGI IMPLEMENTASI SPIP

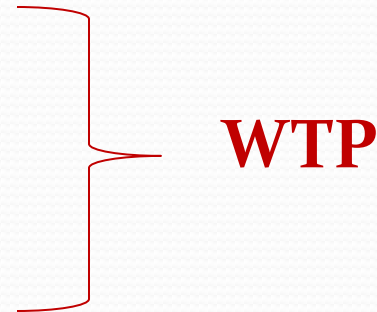
TUJUAN SPIP

1. EFISIENSI &
EFEKTIVITAS

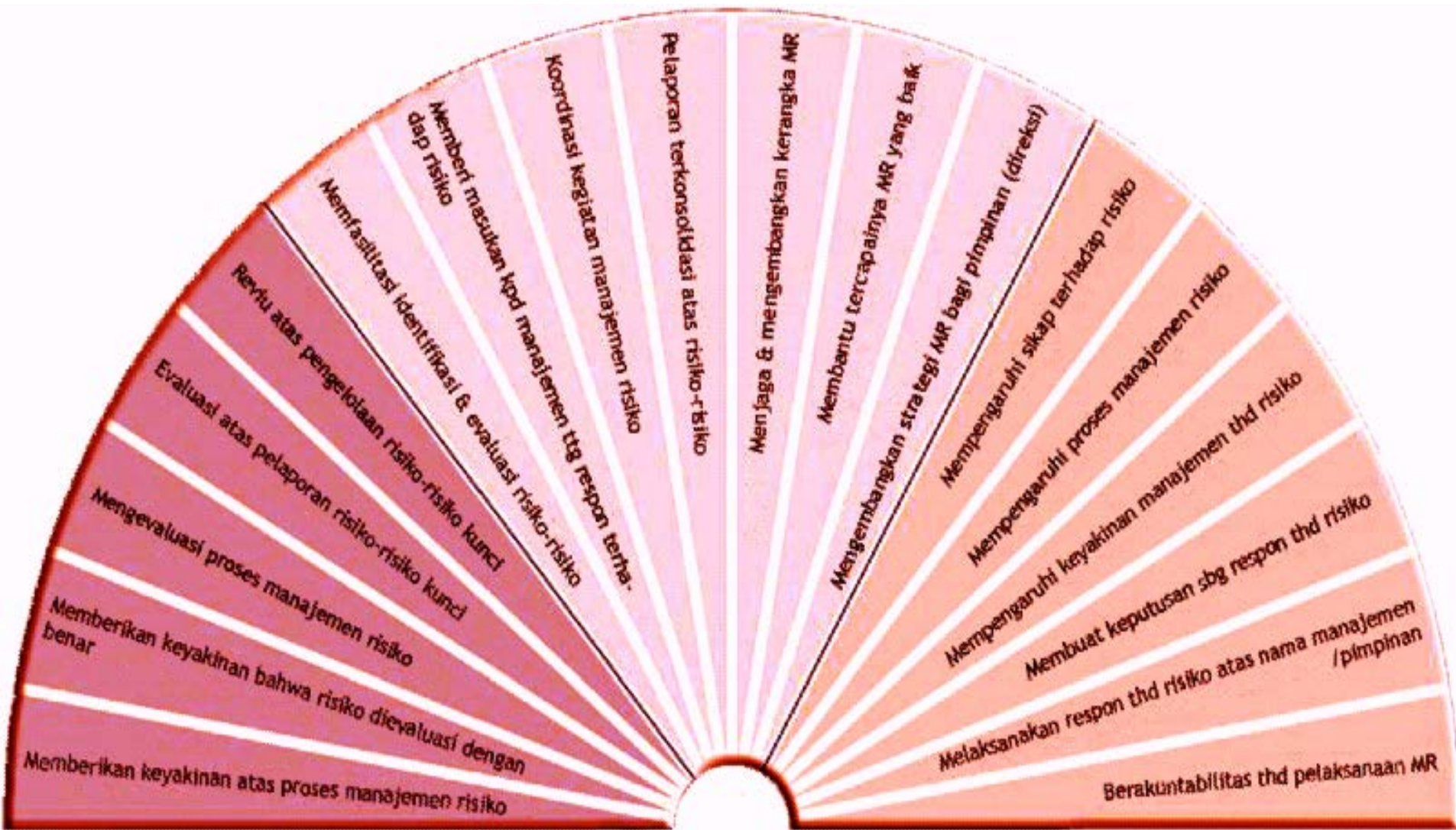


PROGRAM/
KEGIATAN

- 2. LAPORAN KEUANGAN
- 3. PENGAMANAN ASET
- 4. KETAATAN



Peran Auditor Intern dalam Manajemen Risiko



Peran **utama** yang dilakukan audit internal

Peran yang **dapat** dilakukan audit internal

Peran yang **tidak** disarankan untuk dilakukan

PERAN AUDITOR INTERN DALAM MR

PERAN ASSURANCE RECOMMENDED

- Memberi keyakinan thd proses MR.
- Memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar.
- Mengevaluasi proses MR.
- Mengevaluasi pelaporan risiko-risiko penting (*key risks*).
- Mereview pengelolaan risiko-risiko penting.

PERAN KONSULTANSI RECOMMENDED

- Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko.
- Membantu manajemen dalam merespon risiko.
- Mengoordinasikan kegiatan MR
- Konsolidasi pelaporan risiko.
- Memelihara dan mengembangkan kerangka MR.
- Mengupayakan berjalannya MR.
- Mengembangkan strategi MR yg disetujui pimpinan/direksi.

NOT RECOMMENDED

- Memengaruhi / membentuk sikap tertentu thd risiko.
- Memengaruhi proses MR.
- Memengaruhi keyakinan manajemen terhadap risiko.
- Mengambil keputusan sbg respon thd risiko.
- Melaksanakan respon thd risiko atas nama manajemen.
- Berakuntabilitas atas MR.





TERIMA KASIH